

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

*RIZKY AMALIA SUGISTA*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

# **THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND SOCIETY PARTICIPATION IN RURAL FINANCIAL MANAGEMENT TOWARDS RURAL DEVELOPMENT**

**(Empirical Studies In The District of South Lampung)**

**By**

**RIZKY AMALIA SUGISTA**

This study aims to examine the influence of transparency, accountability, and society participation in rural financial management towards rural development. This study used survey method with questionnaires as its instrument. The population of this study are the rural society in the district of South Lampung. Based on purposive sampling, the number of samples obtained is 400 people. The type in this study is a quantitative study with a view to found the truth contained in this study, which is using multiple linear regression tests and tested the validity and reliability the quality of the questionnaires with SPSS 23 software application.

The result of this study found that transparency, accountability, and society participation have a significant positive effect towards rural development partially. This study is expected to provide input for the rural government and local government of South Lampung to synergize to improve transparency, accountability, and society participation in rural financial management so that increasingly improving the rural development into an independen rural.

**Keywords** : Transparency, accountability, society participation, rural development.

## ABSTRAK

# **PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

**RIZKY AMALIA SUGISTA**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel yang diperoleh adalah 400 orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam masalah penelitian ini dengan pengujian regresi berganda dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menentukan kualitas kuesioner yang digunakan dengan bantuan *software* SPSS 23.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk saling bersinergi agar lebih meningkatkan lagi tansparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sehingga semakin meningkatkan pembangunan desa menjadi desa mandiri.

**Kata kunci : Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pembangunan desa.**

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

***RIZKY AMALIA SUGISTA***

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

**Judul Skripsi**

**: PENGARUH TRANSPARANSI,  
AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN DESA (Studi Empiris di  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama Mahasiswa**

**: Rizky Amalia Sugista**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 1311031098**

**Program Studi**

**: S1 Akuntansi**

**Fakultas**

**: Ekonomi dan Bisnis**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19710802 199512 2 001

**Pigo Nauli, S.E., M.Sc.**  
NIP 19820623 200812 1 001

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**

**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001

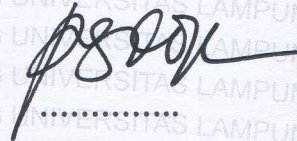
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**

  
.....

**Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc.**

  
.....

**Penguji Utama : Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph. D., Akt., CA.**

  
.....

**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Hl. Satria Bangsawan, S. E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Laporan skripsi dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau penutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2017



Rizky Amalia Sugista  
NPM. 1311031098

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Pringsewu pada tanggal 29 September 1995 sebagai putri pertama dan satu-satunya dari pasangan Sugiyo dan Asita. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Dharma Wanita pada tahun 2001, melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Way Urang pada tahun 2007, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kalianda pada tahun 2010 dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Kalianda hingga lulus pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan berhasil lulus ujian komprehensif pada tanggal 16 Agustus 2017. Selama menjadi mahasiswa penulis terdaftar sebagai Staff Bidang 3 *Economic and Business Entrepreneur Club* (EBEC) periode 2014/2015.

.



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

**Karya tulis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi:**

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, dan fasilitas untukku meraih pendidikan hingga saat ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepadaku. Semoga Ibu dan Ayah selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.

Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan doa.

Seluruh sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan semangat.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

**MOTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(Q.S. Al-Insyirah 94:5)*

*“Hasil tidak akan mengkhianati proses”*

*(Anonymous)*

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S. E., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph. D., Akt., CA., selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Akt., selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis selama menempuh program pendidikan S1.
8. Karyawan dan karyawanati jurusan S1 Akuntansi yang banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan.
9. ORANG TUA DAN KELUARGA
10. Keluarga Mirandaku, Bebeb, Lolly, Fifi, Kiki, Nci, Emak, Epa, Susi, *thank you for being with me in everytime I need you girls, love ya.*
11. *Ma besties*, Baday dan Melan yang walaupun kita jauh terpisah tetap saling *support.*
12. *Roommate* KKN selama 2 bulan, Mba Rezlinda, Ode, dan Imel. Pengalaman kita bertualang di gunung tidak akan terlupakan, *keep in touch my strong girls. See ya to the next adventure.*
13. Grup typo yang walaupun sudah bubar, terima kasih untuk 4 tahun yang sudah berlalu, semoga kita bisa mencapai kesuksesan kita masing-masing.

14. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2013 dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2017

Penulis,

**Rizky Amalia Sugista**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
HALAMAN JUDUL .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
PERSEMBAHAN .....	x
MOTO .....	xi
SANWACANA .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Akademis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	5

<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Landasan Teori .....	6
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i> .....	6
2.1.2 Konsep Transparansi .....	8
2.1.3 Konsep Akuntabilitas .....	12
2.1.4 Konsep Partisipasi Masyarakat .....	18
2.1.5 Konsep Pembangunan Desa .....	23
2.2 Penelitian Terdahulu .....	26
2.3 Kerangka Pemikiran .....	27
2.4 Hipotesis Penelitian .....	28
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Metode Penelitian .....	32
3.2 Definisi Konseptual .....	32
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	34
3.4.1 Variabel Independen .....	34
3.4.2 Variabel Dependen .....	34
3.4 Populasi dan Sampel .....	38
3.5.1 Populasi .....	38
3.5.2 Sampel .....	39
3.5 Sumber Data .....	40
3.6 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7 Teknik Penentuan Skor .....	42
3.8 Uji Analisis Data .....	43
3.8.1 Uji Reliabilitas .....	43
3.8.2 Uji Validitas .....	43
3.8.3 Uji Hipotesis .....	44
3.8.3.1 Uji <i>t</i> .....	45
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Karakteristik Demografi Responden .....	46
4.2 Uji Analisis Data .....	51

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Data .....	51
4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	55
4.3 Uji Hipotesis .....	56
4.4 Pembahasan .....	58
4.4.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa .....	58
4.4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa .....	59
4.4.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa ..	59
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Simpulan .....	61
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	62
5.3 Saran .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tabulasi Definsi Operasional Variabel .....	35
3.2 Daftar Jumlah Penduduk Desa di Kabupaten Lampung Selatan .....	39
4.1 Jenis Kelamin Responden .....	46
4.2 Usia Responden .....	46
4.3 Pendidikan Terakhir Responden .....	47
4.4 Asal Desa Responden .....	47
4.5 Hasil Perhitungan Validitas pada Seluruh Variabel .....	52
4.6 Hasil Perhitungan Reliabilitas Seluruh Variabel .....	53
4.7 Hasil Perhitungan Validitas Data pada Seluruh Variabel .....	53
4.8 Hasil Perhitungan Reliabilitas Data pada Seluruh Variabel .....	54
4.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	55
4.10 Hasil Uji Statistik $t$ .....	56
4.11 Hasil Penelitian .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Desa .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Distribusi Skor Kuesioner
- Lampiran 3 Daftar Nama Desa di Kabupaten Lampung Selatan
- Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 5 Statistik deskriptif
- Lampiran 6 Uji Hipotesis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Adisasmita, 2010:28).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Untuk merealisasikan pengaturan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance* (Mardiasmo, 2006).

Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggara negara yang demokratis menjadi syarat mutlak terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab (akuntabilitas), transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga hal tersebut ada dalam diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat (2)). Sedangkan aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses Pelaksanaan dimulai dari Pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya sampai dengan diterimanya bukti pembayaran dari penyedia barang/jasa sehingga dapat dibukukan oleh Bendahara Desa.

Sementara tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

Pada hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015 lalu, Lampung Selatan menjadi Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki indeks tertinggi dengan rata-rata indeks sebesar 0,6179 dari 13 kabupaten di provinsi Lampung dan berada diatas rata-rata nasional. Dengan indeks ini Lampung Selatan tergolong dalam desa berkembang (Hamidi, dkk : 2015).

Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Simanulang, Badaruddin, dan Suryadi (2013) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan

Laguboti Toba Samosir”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam implementasi kegiatan dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada program PNPM.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu dari penelitian Simanulang, Badaruddin, dan Suryadi (2013) dengan menambah variabel independen partisipasi masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan fenomena yang telah disebutkan sehingga peneliti akan menguji **“Pengaruh Tranparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa?
- 1.2.2 Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa?
- 1.2.3 Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 1.3.2 Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
- 1.3.3 Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait dengan akuntansi sektor publik.
- 1.4.2 Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk saling bersinergi agar lebih meningkatkan lagi tansparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sehingga semakin meningkatkan pembangunan desa menjadi desa mandiri.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Stewardship Theory***

Menurut teori *stewardship*, pemilik (*principal stakeholders*) perusahaan adalah direktur dan karyawan (*principals* dan *stewards*). Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah tersusun, dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principals*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori *Stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan (*stewardess*) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik bagi *principal*-nya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991). Selanjutnya (Chinn, 2000) *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Berdasarkan teori ini kedua kelompok yaitu *principal* dan *steward* bekerja bersama-sama guna meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan mereka. *Principals* merekrut pegawai berdasarkan kemampuan mereka dalam menggerakkan sumber daya organisasi guna memaksimalkan *stakeholder* benefit, Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manager atau *steward* dan pemilik atau *principal* berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi. Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal, terutama dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek psikologis dari teori ini. Penciptaan nilai (*value creation*) dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi aset perusahaan, baik karyawan (*human capital*), aset fisik (*physical capital*), maupun *structural capital*. Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan *value added* bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan *stakeholders*.

Meskipun demikian, pada akhirnya pegawai bekerja adalah guna memenuhi kebutuhan psikologis dan sosiologis mereka sendiri (Davis, Schorman dan Donaldson, 1997, dalam *Kehelwalatenna* dan *Gunaratne*, 2010). Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa kedua pihak tersebut tidak berusaha meningkatkan nilai bagi pihak *stakeholder* yang lain, oleh sebab itu, nilai tambah seperti pembayaran bunga kepada kreditor dan pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan hal diluar keinginan pemilik dan pegawai. Bahkan, nilai tambah seperti diatas

dianggap sebagai efek samping dari usaha meningkatkan kesejahteraan pemilik dan keuntungan manajer.

## **2.1.2 Konsep Transparansi**

### **2.1.2.1 Pengertian Transparansi**

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Mardiasmo (2006) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

#### **2.1.2.2 Prinsip-prinsip Transparansi**

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat. Prinsip transparansi

menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

### **2.1.2.3 Indikator Transparansi**

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya .
- c. Kemudahan akses informasi

- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa

### **2.1.3 Konsep Akuntabilitas**

#### **2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas**

Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Keuangan desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Konsep ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli antara lain :

Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Akuntabilitas yakni para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan (Hadi, 2006:150).

Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsif pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

### **2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas**

Menurut Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya



supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

## 2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

## 3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

## 4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

## 5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepala desa, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program, pertanggungjawaban kebijakan dan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana atas pengelolaan Keuangan desa.

Tjokroamidjojo (2001:45) menyebutkan ada empat jenis akuntabilitas yaitu :

- a. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
- b. Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan BPK
- c. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum
- d. Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab pada rakyat melalui system perwakilan.

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu salah satu jenis akuntabilitas keuangan melalui sebuah lembaga, yaitu pemerintahan desa. Akuntabilitas terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa oleh tim pelaksana I dalam bidang pemerintahan maupun tim pelaksana II pada bidang pemberdayaan masyarakat.

### **2.1.3.3 Aspek-aspek Akuntabilitas**

Menurut Paul ( dalam Supriatna, 2001:103 ) akuntabilitas dapat dibedakan atas : *democratic accountability, profesional accountability, and legal accountability.*

- a. *Democratic Accountability*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara *administrative dan politic accountability*. Menggarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing..

b. *Profesional Accountability*

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan *public interest* atau kepentingan masyarakat.

c. *Legal Accountability*

Berdasarkan katagori akuntabilitas legal ( hukum ), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods dan public service* yang merupakan tuntutan(*demand*) masyarakat (*customer*). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

Akuntabilitas dalam penelitian ini termasuk ke dalam legal *accountability* atau akuntabilitas yang pelaksanaannya didasarkan atas hukum, dimana pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ada dan jika pemerintah desa maupun tim pelaksana keuangan desa melakukan pelanggaran

dalam pengelolaan keuangan desa maka mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.3.4 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Menurut Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Disebutkan oleh Russel & Shafritz (1997:368), indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program
3. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai
4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa
- b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban
- d. Adanya keterlibatan aktor publik

## **2.1.4 Konsep Partisipasi Masyarakat**

### **2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Posisi masyarakat sipil dalam perwujudan *good governance* adalah bagian yang cukup penting. Posisi masyarakat sama halnya seperti pemerintah maupun kelompok swasta. Ia memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan *good governance*. Peranan penting dari masyarakat ini diwujudkan melalui partisipasi. Dalam hal ini partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan pemerintah/politik/negara.

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan.

Peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun kalangan swasta semata. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan juga sangatlah diperlukan. Karena masyarakat yang punya kehendak, punya suara dan mempunyai sumberdaya. Inilah posisi tawar masyarakat sangat penting. Karenanya partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang utama dalam upaya mewujudkan *good governance*. Ini sebagai upaya percepatan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.

#### **2.1.4.2 Dimensi dan Indikator Partisipasi Masyarakat**

##### **a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan**

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan (Ndraha, 1994). Korten (1981) menyatakan bahwa masyarakat penerima program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program pembangunan (lihat Supriatna, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat.

Indikator dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator sebagai berikut, 1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) kesediaan dalam memberikan data dan informasi, 3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, 4) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan 5) keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

##### **b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan.**

Mengenai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan meliputi 1) partisipasi dalam sumber daya, 2) partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan 3) partisipasi

dalam pendaftaran program. Dikemukakan lebih lanjut oleh Ndraha (1994) bahwa partisipasi dalam pelaksanaan meliputi 1) mengarahkan daya dan dana, 2) administrasi dan koordinasi, dan 3) penjabaran dalam program.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan 4 indikator meliputi, 1) keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 2) kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan, 3) kesediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, dan 4) tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.

### **c. Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil.**

Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dapat dibedakan menjadi, pertama, manfaat material seperti peningkatan pendapatan atau aset lain yang penting bagi kepentingan pribadi. Kedua, manfaat sosial, pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa lain. Ketiga, manfaat individual seperti pengembangan diri, kekuasaan politik, dan kepercayaan umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan kuasanya.

Keempat, konsekuensi yang diharapkan. Ndraha (1989) menyatakan bahwa partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti 1) menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, 2) menggunakan, memanfaatkan setiap hasil pembangunan, 3) mengusahakan (menjadikan suatu lapangan usaha dan mengeksploitasikannya) misalnya pembangkit tenaga listrik, perusahaan desa dan sebagainya, 4) memelihara secara rutin dan sistematis, tidak dibiarkan rusak



dengan anggapan bahwa kelak ada bantuan pemerintah untuk pembangunan baru,  
5) mengatur penggunaan dan pemanfaatannya, pengusaha dan pengamanannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator dari dimensi keterlibatan dalam menerima, memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan meliputi, 1) pemahaman tentang hakikat pembangunan, 2) kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan, 3) kesediaan dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan, 4) kesediaan dalam mengembangkan hasil pembangunan.

#### **d. Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil.**

Setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan suatu pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan bila terjadi penyimpangan segera diperbaiki. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan,

Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa “tanpa pengawasan dan pengendalian, apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan”. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat dalam pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan, baik fisik maupun non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ndraha (1989) mengatakan bahwa agar pengawasan dapat berlangsung, diperlukan beberapa syarat atau kondisi, yaitu, 1) adanya norma, aturan dan standar yang jelas, 2) adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan tersebut, 3) adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tersedia pada waktunya, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud, 4) adanya evaluasi kegiatan, yaitu sebagai pembanding antara norma dengan informasi, 5) adanya keputusan guna menetapkan hasil evaluasi tersebut, 6) adanya tindakan pelaksanaan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan ditetapkan 7 indikator yang meliputi, 1) adanya norma atau aturan standar, 2) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, 3) keaktifan dalam melakukan pengawasan, 4) dampak pendapatan negara dan daerah, 5) dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 6) dampak terhadap pengembangan sektor lain, 7) pemberian saran dan kritik dari masyarakat.

## **2.1.5 Konsep Pembangunan Desa**

### **2.1.5.1 Pengertian Pembangunan Desa**

Menurut Siagian (1981:21) Indeks pembangunan desa merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam buku Indeks Pembangunan Desa (Barokah, dkk. 2015), pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (*rural*) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar.

Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan (*urban bias*). Pembangunan perdesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa, dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

### **2.1.5.2 Dimensi dan indikator pembangunan desa**

Dalam buku Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Hamidi, dkk. 2015), dimensi dan indikator pembangunan desa adalah sebagai berikut.

#### 1. Dimensi Sosial

Dalam dimensi sosial, indikator yang digunakan adalah:

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Modal sosial
- d. Permukiman

#### 2. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Dalam dimensi ketahanan ekonomi, indikator yang digunakan adalah:

- a. Keragaman produksi
- b. Pusat pelayanan perdagangan
- c. Akses distribusi
- d. Akses lembaga keuangan
- e. Lembaga ekonomi
- f. Keterbukaan wilayah

#### 3. Dimensi Ekologi

Dalam dimensi ekologi, indikator yang digunakan adalah:

- a. Kualitas lingkungan
- b. Potensi/rawan bencana alam

## 2.2 Penelitian Terdahulu

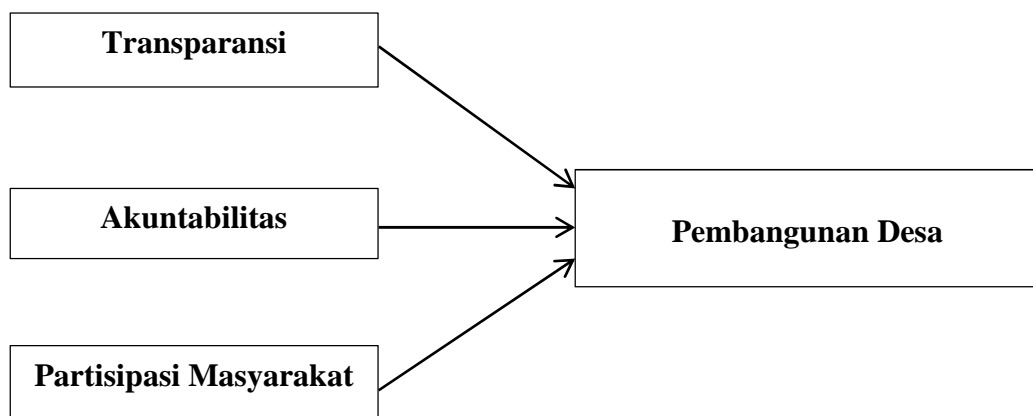
1. Simanulang, Badaruddin, dan Suryadi (2013) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada program PNPM.
2. Ray Septianis Kartika (2012), meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di desa Tegeswetan dan desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa.
3. Justita Dura (2016), meneliti tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara ketiga variable tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Nafidah dan Suryaningtyas (2015) melakukan penelitian tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas ADD secara teknik dan administrasi berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam telaah pustaka diatas, dapat disusun suatu kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Bagan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa



## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan telaah pustaka dan tujuan penelitian maka hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah:

### **2.4.1 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa**

Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan

yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H<sub>1</sub> : Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.**

#### **2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa**

Akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akuntabilitas ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan prinsip ini, pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



**H<sub>2</sub> : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.**

### **2.4.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa**

Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, masyarakat dapat turut berpartisipasi dan ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Makna dari partisipasi tak hanya ikut serta dalam kegiatan namun juga masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya keterlibatan sejak awal, maka diharapkan seluruh dana untuk pengelolaan desa dapat ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan keinginan para pemerintah desa bersama elit-elit desa.

Dengan demikian, hak masyarakat desa dapat terpenuhi dan dengan sendirinya akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari segenap masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Dalam hal ini peran masyarakat juga dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, ini merupakan salah satu bentuk implementasi keuangan desa yang telah diterima. Tujuan dari prinsip partisipatif ini adalah dapat tersalurkannya hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat, maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pemanfaatan keuangan desa. Selain itu, bagaimana masyarakat mau dan mampu untuk mengawasi pelaksanaan program yang dilakukan sebagai realisasi keuangan desa yang diterima.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H<sub>3</sub> : Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Arikunto (2006:12) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Oleh sebab itu pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik jika disertai tabel grafik dan bagan. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam masalah penelitian ini, yaitu untuk menganalisis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan informasi yang diperoleh langsung dari responden penelitian.

### **3.2 Definisi Konseptual**

Menurut Bahri (2008:30) pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Sehingga peneliti mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi dan objek tersebut ditempatkan kedalam golongan tertentu. Woodruff (dalam Amin, 1987, dalam Kahlidin, 2005) mendefinisikan konsep sebagai 1) salah satu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, 2) suatu pengertian tentang suatu objek, 3) produk subjektif yang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-

benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda).

Berdasarkan pengertian tersebut, definisi konsep dalam penelitian ini yaitu:

- a. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. (Mardiasmo, 2004:30).
- b. Akuntabilitas merupakan pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya lebih jauh. (Mardiasmo, 2004:29).
- c. Partisipasi Masyarakat merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.
- d. Pengelolaan keuangan desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa dengan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab utama.
- e. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat meberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat dalam setiap pembangunan yang diinginkan.

### **3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 3.4.1 Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Sugiyono, 2013:61). Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan partisipasi masyarakat (X3). Variabel independen tersebut diukur dengan 13 pertanyaan kuisisioner. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen yaitu menggunakan skala likert 5 point.
- 3.4.2 Variabel dependen adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2013:61), maka yang menjadi variabel Y dalam penelitian ini yaitu pembangunan desa. Variabel dependen ini juga diukur dengan menggunakan 23 pertanyaan kuisisioner. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel dependen sama dengan variabel independen yaitu dengan menggunakan skala likert 5 point.

Berikut adalah operasional variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3.1  
Tabulasi Definsi Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
1.	Transparansi (X1)	a. komunikasi publik oleh pemerintah  b. hak masyarakat terhadap informasi	- mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi  - mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik  - mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi	1. adanya musyawarah rencana penggunaan keuangan desa  2. adanya akses terhadap informasi mengenai rencana penggunaan keuangan desa  3. keterbukaan informasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa  4. keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan pembangunan desa
2.	Akuntabilitas (X2)	a. akuntabilitas program  b. akuntabilitas kinerja  c. akuntabilitas kebijakan	- Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa  - Pengawasan oleh tim pelaksana  - Adanya laporan pertanggungjawaban	5. Adanya laporan mengenai rincian dana penggunaan keuangan desa kepada masyarakat  6. Adanya pengawasan Tim Pelaksana terhadap penggunaan keuangan desa  7. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan

				keuangan desa
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)	<p>a. perencanaan</p> <p>b. pelaksanaan</p> <p>c. penerimaan dan manfaat hasil</p> <p>d. pengawasan dan penilaian hasil</p>	<p>- keterlibatan dalam perencanaan pembangunan</p> <p>- keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan</p> <p>- menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan</p> <p>- kesempatan masyarakat melakukan pengawasan</p>	<p>8. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum keuangan desa selalu melibatkan masyarakat</p> <p>9. kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan</p> <p>10. kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan</p> <p>11. kesediaan dalam melestarikan hasil pembangunan</p> <p>12. kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan</p> <p>13. pemberian kritik dan saran dari masyarakat</p>
4.	Pembangunan Desa (Y)	a. sosial	<p>- Kesehatan</p> <p>- Pendidikan</p>	<p>14. Kersedia tenaga kesehatan, bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lain</p> <p>15. Ketersediaan dan akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu</p> <p>16. ketersediaan dan akses ke Sekolah Dasar</p> <p>17. ketersediaan dan akses ke SMP</p>

				18. ketersediaan dan akses ke SMA
			- Modal sosial	19. adanya kegiatan gotong royong di desa
				20. keberadaan ruang publik terbuka bagi warga
			- Permukiman	21. tersedianya sumber air bersih
				22. tersedianya MCK
				23. tersedianya tempat pembuangan sampah
		b. ekonomi	- Keragaman produksi	24. terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
			- Pusat pelayanan perdagangan	25. tersedia dan akses ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)
			- Akses distribusi	26. terdapat kantor pos dan jasa logistik
			- Lembaga ekonomi	27. tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta)
				28. tersedianya koperasi
				29. terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
			- Keterbukaan	30. terdapat



		c. ekologi	wilayah  - Kualitas lingkungan  -Potensi/rawan bencana alam	transportasi umum  31. kualitas jalan desa (jalan terluas di desa dengan aspal)  32. adanya pencemaran air, tanah, dan udara  33. kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)  34. upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam  35. upaya antisipasi, mitigasi bencana alam
--	--	------------	---	---

Sumber: Hasil Data Olah 2017

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh desa yang ada di kabupaten Lampung Selatan.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten tertua di provinsi Lampung, dengan luas wilayah 700,32 km<sup>2</sup> memiliki 17 kecamatan, 256 desa dan 4 kelurahan. Lampung Selatan dipilih sebagai populasi karena Lampung Selatan adalah Kabupaten dengan IDM tertinggi dengan rata-rata indeks sebesar 0,6179 dari 13 kabupaten di provinsi Lampung dan berada diatas rata-rata nasional.

Dengan indeks ini Lampung Selatan tergolong dalam desa berkembang. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa dari 256 desa yang berada di kabupaten Lampung Selatan.

### 3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi itu sendiri, sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dari desa di Kabupaten Lampung Selatan. Berikut adalah jumlah penduduk desa di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.2  
Daftar Jumlah Penduduk Desa di Kabupaten Lampung Selatan

Nama Kecamatan		Perdesaan		
		Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
060	Natar	37.197	35.385	72.582
070	Jati Agung	33.133	30.892	64.025
080	Tanjung Bintang	15.836	14.929	30.765
081	Tanjung Sari	13.915	13.192	27.107
090	Katibung	31.725	29.697	61.422
091	Merbau Mataram	24.061	22.583	46.644
092	Way Sulan	10.974	10.290	21.264
100	Sidomulyo	20.706	19.399	40.105
101	Candipuro	25.784	24.472	50.256
102	Way Panji	8.250	8.091	16.341
110	Kalianda	23.042	20.110	43.152
111	Rajabasa	10.156	9.005	19.161
120	Palas	27.292	26.200	53.492
121	Sragi	16.226	15.428	31.654
130	Penengahan	18.512	17.160	35.672
131	Ketapang	23.785	22.331	46.116
132	Bakauheni	4.613	4.343	8.956
<b>Kabupaten Lampung Selatan</b>		<b>345.207</b>	<b>323.507</b>	<b>668.714</b>

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Besarnya sampel ditentukan dengan rumus *Slovin*, yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

- n = ukuran sampel  
 N = ukuran populasi  
 e = batas toleransi kesalahan

Menentukan besarnya sampel dengan batas ketelitian 5%,

$$n = \frac{668.714}{1 + (668.714)(0.05)^2}$$

$$n = 399,760878 \text{ dibulatkan menjadi } 400$$

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar nantinya data yang diperoleh bisa lebih representatif (Sugiyono, 2014). Berdasarkan perhitungan sampel, kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah:

1. Masyarakat tetap yang tinggal di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pendidikan terakhir minimal SMA.

### 3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil kuisisioner yang dibagikan kepada 400 masyarakat desa dari 256 desa di kabupaten Lampung Selatan yang menjadi

sampel dalam penelitian ini. Dalam pencarian data primer ada tiga dimensi penting yang perlu diketahui yaitu :

- a. Kerahasiaan, mencakup mengenai apakah tujuan penelitian untuk diketahui oleh responden atau tidak.
- b. Stuktur, struktur berkaitan dengan tingkat formalitas, seperti dalam mencari data peneliti menggunakan alat penelitian misalnya kuisisioner.
- c. Metode koleksi, metode koleksi menunjuk pada sarana untuk mendapatkan data.

### **3.6 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah dalam penulisan ini.

#### **2. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai gambaran umum perusahaan dan data-data yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan. Adapun alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Menurut Arikunto (2010:140) kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya. Adapun pertanyaan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pertanyaan berstruktur yang merupakan pertanyaan baru dan belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pertanyaan berstruktur bertujuan agar jawaban yang diberikan oleh responden dapat dibatasi, hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh informasi berupa jawaban tertulis mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dari responden yaitu masyarakat desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

### **3.7 Teknik Penentuan Skor**

Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya yaitu teknik penentuan skor. Hal ini dilakukan karena salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada responden dengan beberapa alternatif jawaban yang masing-masing jawaban telah diberi skor. Skala yang digunakan dalam menetapkan skor dalam penelitian ini yaitu skala likert. Dengan skala likert jawaban yang tersedia dari SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju) yang masing-masing diberi skor sebagai berikut :

Jawaban SS diberi skor 5

Jawaban S diberi skor 4

Jawaban N diberi skor 3

Jawaban TS diberi skor 2

Jawaban STS diberi skor 1

Teknik penentuan skor dilakukan agar memudahkan peneliti dalam memasukkan data / informasi dari responden yang dilakukan pada tahap pengumpulan data.

Pemberian skor juga bertujuan mempermudah peneliti dalam mengolah data hasil penelitian.

### **3.8 Uji Analisis Data**

#### **3.8.1 Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Ghozali (2016) menyatakan bahwa suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah *one shot* atau pengukuran sekali saja, yaitu pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur konstruk tertentu.

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  (Ghozali, 2016:48 ). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pengujian reliabilitas ini menggunakan program SPSS versi 23 dengan metode *Cronbach's Alpha*.

#### **3.8.2 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghozali (2016:53 ). Menurut Ghozali (2016:52-59), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (  $df$  ) =  $n-2$ , dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jadi  $df$  yang digunakan adalah  $400-2 = 398$  dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0.0981 dengan ketentuan :

Hasil r hitung > r tabel ( 0.0981 ) = valid

Hasil r hitung < r tabel ( 0.0981 ) = tidak valid

Jika r hitung ( tiap butir dapat dilihat pada *colom corrected item – total correlation* ) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

### 3.8.3 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah regresi linier berganda (*multiple regression*). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Pembangunan Desa
- = Konstanta
- = Koefisien Regresi
- X<sub>1</sub> = Transparansi
- X<sub>2</sub> = Akuntabilitas

$X_3$  = Partisipasi masyarakat  
e = standard error

### 3.8.3.1 Uji *t*

Ghozali (2016:98) menjelaskan bahwa uji statistik *t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Salah satu cara melakukan uji *t* adalah dengan membandingkan nilai statistik *t* dengan baik kritis menurut tabel.

Sedangkan menurut Sugiyono (2014:194) uji *t* digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat

Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan  $\alpha = 0,05$ . Maka cara yang dilakukan adalah:

- a. Bila (P-Value)  $< 0,05$  artinya variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
- b. Bila (P-Value)  $> 0,05$  artinya variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan pada 400 orang responden yang berasal dari desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa secara parsial :

1. Variabel transparansi terdukung dalam penelitian ini sehingga semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa.
2. Variabel akuntabilitas terdukung dalam penelitian ini yang berarti semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
3. Variabel partisipasi masyarakat terdukung dalam penelitian ini yang berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif baik dalam pengelolaan

keuangan maupun pembangunan desa sehingga dapat mengontrol pembangunan desa.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan, yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sementara masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pembangunan desa.
2. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang menjawab pertanyaan hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka rasakan. Hal ini dapat menjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dan kenyataan yang terjadi di lapangan karena banyak dari responden yang mungkin tidak memahami pertanyaan kuesioner sehubungan dengan variabel taransparansi dan akuntabilitas sehingga memungkinkan terjadinya bias data.

## **5.3 Saran**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian terkait yang lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat penulis berikan diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan juga meneliti pengaruh dari faktor-faktor lain terhadap pembangunan desa.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan aparat desa sebagai sampelnya untuk mengatasi kelemahan yang ditimbulkan dari jawaban masyarakat tentang pembangunan desa.
3. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya menggunakan metode lain seperti metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara triangulasi/gabungan untuk mastikan kebenaran data secara mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri. 2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barokah, dkk. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik
- Chinn, Richard. 2000. *Corporate Governance Handbook*. London: Gee Publishing Ltd
- Cohen, J.M. dan Uphoff, N.T. 1977. *Rural Development Participation*. New York: Cornel University RDCCIS.
- Coryanata, Isma. 2012. "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2 Juli 2011: 110-125*
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns". *Australian Journal of Management, 16: 49-64*.
- Dura, Justita. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)." *Jurnal JIBEKA Vol.10 No.1 Agustus 2016: 26 – 32*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hadi, Ismono. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (Untuk Mahasiswa)*. Lampung: Universitas Lampung
- Hamidi, dkk. 2015. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negera Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Kartika, Ray Septianis. 2012. "Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Bina Praja Vol. 4 No. 3 September 2012: 179-188*
- Khelwatenna, Sampath dan P. S. M. Gunaratne. 2010. *The Impact of Intellectual Capital on The Firm Performance and Investor Response: An Empirical Study of Selected Sectors in Colombo Stock Exchange. ICBI 2010, University of Kelanja Sri Lanka*
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. New York : 98
- Khalidin. 2005. "Penggunaan Model Pembelajaran Generatif untuk meningkatkan pemahaman Konsep Pembiasaan pada Lensa Kelas I SMA". *Tesis Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Korten, David C. 1981. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lalolo, Krina Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional
- Mahfudz. 2009. "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa". *Jurnal Organisasi dan Manajemen., Volume 5, Nomor 1*.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Kedua)*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei 2006*.
- Nafidah dan Suryaningtyas. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal STIE PGRI Dewantara Jombang*.

- Ndraha, T. 1994. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN.
- Rahmawati, Eti Nur. 2014. "Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara". *Skripsi Universitas Lampung*.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Ruslan, Rosady. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sarundajang, SH. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Russel, E.W. & Shafritz. 1997. *Introducing Public Administration*. New York: Longman

- Siagian, P.S. 1991. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simanulang, Lahsa Junianna, Badaruddin, dan Agus Suriadi. 2013. "Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir". *Jurnal Ekonom*, Vol. 16, No.3, Juli 2013.
- Singarimbun, Masri & Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LPSS.
- Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Kinerja Lembaga Publik*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Airlangga.
- Supratna, Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Ulum, Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Replibik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Replibik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Replibik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id> Diakses tanggal 25 November 2016, pukul 15:35 WIB.
- <http://www.desawirausaha.blogspot.com/2015/07/rincian-alokasi-dana-desa-untuk-kabupaten-di-provinsi-lampung.html?m=1> Diakses pada tanggal 25 November 2016, pukul 15:30 WIB
- [http://www.bappenas.go.id/files/5514/4704/6044/Buku\\_Indeks\\_Pembangunan\\_Desa\\_2014.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/5514/4704/6044/Buku_Indeks_Pembangunan_Desa_2014.pdf) Diakses pada tanggal 13 Desember 2016, pukul 21:50 WIB
- <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pembangunan-desa.html> Diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 20:42 WIB

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-des-a-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-des-a> Diakses pada 11 Januari 2017, pukul 06:08 WIB

<https://konsultankti.wordpress.com/2015/05/18/mengenal-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-sebuah-tinjauan-konsep/> Diakses pada 11 Januari 2017, pukul 06:10 WIB

<http://www.radarlamsel.com/giliran-kades-sumurkumbang-dilaporkan-ke-inspektorat/> Diakses pada 28 Januari 2017 pukul 19:10 WIB

<http://csws.fisip.unair.ac.id/strategi-pemberdayaan-masyarakat-des-a-dan-pembangunan-des-a-di-jawa-timur-akuntabilitas-untuk-meningkatkan-partisipasi-dan-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat-des-a-ali-sahab-s-ip/> Diakses pada 4 Juni 2017 pukul 19:13 WIB